

## SUMMARY

# KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSISTENSI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Created by ADRI OCTER FRANKI PATRAS

**Subject** : Kajian hukum, Mahkamah konstitusi  
**Subject Alt** : Study of law, the Constitutional Court  
**Keyword** : kajian hukum;undang-undang;mahkamah konstitusi

### Description :

Pelaksanaan hak menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan atas dasar sistem check and balances, namun demikian putusan MK terkadang diragukan efektivitasnya karena ada kecenderungan tidak dipatuhi dan diabaikan oleh addressat putusan. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis membahas tentang Kajian Hukum Terhadap Konsistensi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana model putusan judicial review Mahkamah Konstitusi ? dan bagaimana kekuatan mengikat dari putusan MK dalam putusan judicial review Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpretative decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitutional) pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Inkonsistensi pada Putusan Nomor 072- 073/PUU- II/2004 mengkategorikan Pilkada langsung sebagai Pemilu dan sengketanya menjadi kewenangan MK, sedangkan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 mengkategorikan Pilkada bukanlah Pemilu dan sengketanya bukanlah menjadi kewenangan MK. Perbedaan hasil penafsiran pada kedua putusan telah menunjukkan adanya Inkonsistensi Putusan yang dibuat oleh MK dalam memaknai pengertian Pilkada dan inkonsisten dalam memutuskan lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hal ini telah menunjukkan ketidak konsistenan MK dalam menafsirkan dan mengawal konstitusi, yang telah mencederai harapan besar akan tujuan dibentuknya lembaga konstitusional ini.

**Date Create** : 24/02/2017  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Master-201404049  
**Collection** : 201404049

**Source** : Master Theses of Law

**Relation Collection** Fakultas Hukum

**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor